

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL (PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH)**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh:

FELKI RASTA TIREZO
NPM :1710012111225

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2023**

No.Reg: 09/Skippsi/HTN/FH/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg : 09/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : **Felki Rasta Tirezo**
NPM : **1710012111225**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal (Pemberian Insentif Dan Kemudahan Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL (PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH)

Felki Rasta Tirezo¹, Nurbeti, SH., MH¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: tirezofelki@gmail.com

ABSTRACT

In the Regional Regulation of Pesisir Selatan Regency Number 5 of 2018 concerning Investment, namely Capital Investment is only a Facility for Providing incentives and conveniences by the Government of Pesisir Selatan Regency. Problem Formulation: 1) How is the Implementation of Pesisir Selatan District Regulation Number 5 of 2018 concerning Investors in Providing Incentives and Facilitation to Micro, Small and Medium Enterprises? 2) What are the obstacles faced by the South Coastal Regional Government in the Implementation of the South Coastal District Regional Regulation Number 5 of 2018 Concerning Investors in Providing Incentives and Facilities for Micro, Small and Medium Enterprises? 3) What are the efforts made by the Regional Government of Pesisir Selatan Regency in overcoming obstacles in the Implementation of Regional Regulation of Pesisir Selatan Regency Number 5 of 2018 Concerning Investors in Providing Incentives and Facilities for Micro, Small and Medium Enterprises? Types of sociological juridical research. Sources of data using primary and secondary data sources. Data collection techniques are document studies, interviews, and analysis of qualitative descriptive data. Research results: 1) Implementation of Pesisir Selatan Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Investors in Providing Incentives and Facilities for MSMEs has been partially implemented. 2) the obstacles faced are Communication, Territory, and Community. 3) The efforts of the Pesisir Selatan Regency Government to further enhance cooperative relations.

Keywords: Investment, Incentive, Facility

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

* Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relatif kecil. ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat merealisasikan Perda itu dalam bentuk memberi Insentif dan Kemudahan terhadap usaha yang ada di Pesisir Selatan.

Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2021

JENIS USAHA	JUMLAH UMKM		
	TAHUN		
	2019	2020	2021
MIKRO	5.143	5.335	5.599
KECIL	3.292	3.334	3.429
MENENGAH	184	184	221
JUMLAH	8.619	8.853	9.249

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2022.

Berdasarkan pandangan penulis, penulis menemukan bahwa Pemberian Insentif dan

kemudahan terhadap UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan harus berjalan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2018, maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
3. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Untuk menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹

2. Bahan Hukum Sekunder

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.

D. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pemberian Insentif dan Kemudahan ini pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah sedikit banyak terlaksana khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal. Seperti bisa di lihat usaha mikro, kecil, dan menengah dari tahun 2019 sampai 2021 terus meningkat di daerah Pesisir Selatan. Dan untuk Pemberian dana stimulan, Pemberian bantuan modal, Penyediaan sarana dan prasarana, dan Pemberian bantuan teknis belum dapat telaksana oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena Dana dari Pemerintah pusat tidak memadai untuk dilakukuan hal tersebut.²

Ada 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang memberlakukan Perda Pesisir Selatan no. 5 Bagi investor pada tahun 2018 tentunya melibatkan semua pihak di pemerintahan Pesisir Selatan, dan salah satunya adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri Pesisir Selatan yang kemudian mendaftarkan seluruh usaha mikro, kecil dan menengah. Dan Perda tersebut telah menetapkan beberapa insentif dan kemudahan.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya, Komunikasi yang baik dapat terjalin antara pihak PTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan juga para pelaku UMKM.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah hal sangat penting pada bagian ini untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini pihak PTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan kepada para UMKM tersebut.

3. Disposisi

Tatanan atau sikap pimpinan menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan apabila pegawai yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang direkomendasikan oleh pejabat senior berupa penanganan perkara

¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40

²Hasil wawancara dengan Ibuk Erma, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, Selasa 10 Januari 2023, Pukul. 11.05 WIB.

administrasi dan surat serta sikap melaksanakan kebijakan pembangunan khususnya PTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata ketentuan ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Adapun Kendala-kendala yang terjadi menyebabkan tidak maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Internal.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan:

- a. Komunikasi internal
- b. Luasnya wilayah

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan:

- a. Kurangnya kerjasama
- b. Kurangnya kesadaran oleh masyarakat

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terjadi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Komunikasi internal
- b. Luasnya wilayah.

2. Faktor Eksternal

- a. Meningkatkan kerjasama.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah belum terlaksana dengan baik, masih ada beberapa yang belum terlaksana dikarenakan tidak ada otoritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini yang membuat sedikit lambatnya Perkembangan Ekonomi terhadap UMKM di Pesisir Selatan.
- 2) Kendala yang dihadapi Dinas PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ada 2 macam yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.
- 3) Upaya dalam mengatasi Kendala yang dihadapi Dinas PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir, A) Factor internal, ialah Komunikasi dan luasnya wilayah. B) Factor eksternal, ialah Kurangnya kerjasama, Kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan pada kondisi *Covid-19* maupun tidak kondisi *Covid-19*, PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan kinerja, supaya perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Maju dan Berkembang.
2. Memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi dari pihak pemerintah dalam hal ini pihak PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pelatihan-pelatihan, pembinaan dan evaluasi juga harus terus dimaksimalkan kepada para pelaku usaha di sector UMKM untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Kabupaten Pesisir Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua bpk. **Nastion** dan Ibu **Resfi Livia** yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas.

Dalam Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Nurbeti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal.

C. SUMBER LAIN

- Hamami Cahya Prastika, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 22.28 WIB, <https://repository.unair.com>.